

# **TESIS**

**PENGARUH KAPABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMEDIASI OLEH SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)  
PADA KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Capability on the Quality Of Regional Government Financial  
Statements Mediated by Regional Management Information System (SIMDA)  
in North Toraja Regency*

**AYUSTIANTO TALLULEMBANG  
A042202008**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **TESIS**

## **PENGARUH KAPABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMEDIASI OLEH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Capability on the Quality Of Regional Government Financial  
Statements Mediated by Regional Management Information System (SIMDA)  
in North Toraja Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**AYUSTIANTO TALLULEMBANG  
A042202008**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

### PENGARUH KAPABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMEDIASI OLEH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA KABUPATEN TORAJA UTARA

*The Effect of Capability on the Quality Of Regional Government Financial  
Statements Mediated by Regional Management Information System (SIMDA)  
in North Toraja Regency*

disusun dan diajukan oleh

**AYUSTIANTO TALLULEMBANG  
A042202008**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 05 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA  
NIP. 196302101990021001

Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA  
NIP. 196703191992032003

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AYUSTIANTO TALLULEMBANG**

NIM : **A042202008**

Jurusan/program Studi : **Magister Keuangan Daerah**

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

**PENGARUH KAPABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMEDIASI OLEH SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 06 Agustus 2022

yang menyatakan,



**Ayustianto Tallulembang**

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc,** Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.soc.Sc.,CA** dan **Dr. Ratna A. Damayanti, SE.,Ak., M.soc.Sc.,CA**, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.;
8. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Manajemn Keuangan Daerah..

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

## ABSTRAK

**AYUSTIANTO TALLULEMBANG.** *Pengaruh Kapabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dimediasi oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) di Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Ratna A. Damayanti).

Penguasaan serta pemanfaatan SIMDA belum optimal dalam proses pengelolaan keuangan daerah dengan kendala yang paling sering ditemukan yakni kurang pemahamannya pengguna terkait fitur SIMDA. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh kapabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimediasi oleh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terjadi. Data diolah menggunakan Software SmartPLS. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 46 responden. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara langsung maupun melalui mediasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Kabupaten Toraja Utara

Kata Kunci : Kapabilitas, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)



## ABSTRACT

**AYUSTIANTO TALLULEMBANG. The Effect of Capability on the Quality of Regional Government Financial Statements Mediated by Regional Management Information System (SIMDA) in North Toraja Regency**  
(supervised by Syarifuddin and Ratna A. Damayanti)

The mastery and utilization of SIMDA have not been optimal in the process of regional financial management in which the most common obstacle is the lack of understanding of users regarding SIMDA features. This research aims to analyze and explain the effect of capability on the quality of regional government financial statements (SIMDA) in North Toraja Regency. The type of research used in this study is to obtain objective, valid, and reliable data with the aim of discovering, proving, and developing knowledge, so it can be used to understand, solve, and anticipate problems happening. The sample consist of 46 respondents. The data were obtained by using a questionnaire. They were processed by using SmartPLS software. The results indicate that capability has a positive and significant effect on the quality of regional government financial statements either directly or through the mediation of regional management information system (SIMDA) in North Toraja Regency.

Keywords: capability, quality of financial reports, regional management information system (SIMDA)





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia .....	12
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan.....	24
2.1.4 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ..	28
2.1.5 Kapabilitas .....	34
2.2 Tinjauan Empiris .....	41

### **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

3.1 Kerangka Konseptual.....	45
3.1.1 Pengaruh Kapabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	45

3.1.2	Pengaruh Kapabilitas Terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .....	46
3.1.3	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	47
3.2	Hipotesis .....	49

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1	Rancangan Penelitian.....	50
4.2	Waktu dan Lokasi Penelitian .....	50
4.3	Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	50
4.4	Jenis dan Sumber Data .....	51
4.5	Metode Pengumpulan Data .....	51
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	53
4.7	Instrumen Penelitian .....	54
4.8	Teknik Analisis Data .....	55

#### **BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1	Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	59
5.1.1	Uji Validitas .....	59
5.1.2	Uji Reliabilitas .....	60
5.2	Profil Responden .....	61
5.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
5.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	61
5.3	Analisis Deskriptif .....	62
5.4	Uji Statistik .....	65
5.4.1	Analisis Jalur 1 .....	65
5.4.2	Pengujian Hipotesis .....	66
5.4.3	Analisis Jalur II .....	67
5.4.4	Pengujian Hipotesis II .....	67
5.4.5	Uji Pengaruh Tidak Langsung .....	69
5.4.6	Hasil Uji Hipotesis .....	70

## **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1	Pengaruh Kapabilitas Terhadap Penerapan Simda .....	61
6.2	Pengaruh Kapabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	74
6.3	Pengaruh Penerapan Simda Terhadap Laporan Keuangan.....	76
6.4	Pengaruh Kapabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Penerapan Simda .....	78

## **BAB VII PENUTUP**

7.1	Kesimpulan .....	82
7.2	Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
4.1 Definisi Operasional Variabel .....	53
5.1 Hasil Uji Validita.....	59
5.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	60
5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	61
5.5 Tanggapan Responden Tentang Kapabilitas .....	62
5.6 Tanggapan Responden Terhadap Penerapan SIMDA.....	63
5.7 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	64
5.8 Coefficient .....	65
5.9 Model Summary .....	66
5.10 Coefficient .....	67
5.11 Model Summary .....	68
5.12 Hasil Uji Hipotesis.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pikir .....	48
5.1 Hasil <i>Sobel Test Calculator</i> .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah mengamanahkan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dan keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda (Mahwood dalam Ardinisari, 2019). Sejalan dengan pendapat tersebut, Lemius dalam (Ardinisari, 2019) juga mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan dalam mengambil suatu keputusan politik maupun administratif sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam perkembangan zaman, kegiatan administrasi pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi pemerintahan.

Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangan diperlukan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat (Sulantari, 2019).

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007 dalam Hapsari, 2008).

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan atas laporan keuangan diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009). Karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 antara lain: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut (Wati, 2014). Tujuan umum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Arus Kas, Hasil Operasi, dan Perubahan Ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholder*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Sulantari, 2019).

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Mohune, 2013).

Kualitas dari laporan keuangan daerah bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen. Menurut Wilkonson (2000:25) terdapat kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.” Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.



BPKP meluncurkan suatu aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah (SIMDA DAERAH) sebagai bentuk perwujudan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan daerah. SIMDA Daerah dapat membantu para kepala daerah dan perangkatnya, sehingga mereka tidak disibukkan pelaporan secara terus menerus melainkan dapat fokus pada program daerah sehingga pembangunan dapat merata dan dapat diserap secara maksimal. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001:21). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh *output* yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini penyampaian laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban menjadi lebih tertib dan tepat waktu. Pengimplementasian SIMDA sangat dibutuhkan membantu dalam proses pelaporan keuangan daerah (Lisda, et al. 2018).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Anggraeni & Ridwan, 2014) karena dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) akan membantu pemerintah

mempercepat proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Berdasarkan PP Nomor 192 Tahun 2014 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah suatu aplikasi yang dapat membantu aparatur dalam mengelola dan menghasilkan informasi keuangan daerah yang komprehensif, tepat dan akurat kepada para *stakeholder*. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Arens, 2008) karena SPIP menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Lisda, et al. 2018).

Kapabilitas Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sudarmanto, 2009:12) karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi

laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kapabilitas sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas (Lisda, et al. 2018).

Robbins mendefinisikan kapabilitas sebagai kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan (Robbins & Judge, 2008). Setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam hal kemampuan yang membuatnya secara *relative superior* atau *inferior* terhadap yang lain dalam melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu. Manajemen harus mengetahui bagaimana orang berbeda dalam hal kapabilitas dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa seorang pekerja akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Penelitian sebelumnya menemukan fakta empiris bahwa jumlah SDM pegawai yang dimiliki telah mencukupi, namun dalam penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya serta fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Disisi lain pegawai sebagai pelaksana kebijakan telah dibekali dengan pelatihan atau bimbingan teknis tentang aplikasi SIMDA, serta dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada peraturan yang ditetapkan yaitu

Surat Keputusan yang didalamnya juga mengatur tentang pembagian kewenangan antara *user*, admin, asisten admin dan operator yang merupakan pelaksana kebijakan SIMDA (Sembel et al., 2019).

Pembenahan SDM harus dilakukan melalui penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, penambahan fasilitas sarana-prasarana komputer yang memadai (Sembel et al., 2019). Kapabilitas seseorang pegawai dalam organisasi dapat mempermudah mereka untuk berbuat *fraud* di organisasi tempat mereka bekerja (Yesiariani & Rahayu, 2017). Posisi dalam pekerjaan memberi kekuasaan bagi seseorang untuk mengendalikan situasi yang mereka inginkan untuk mendukung tindakan *fraud* (Agustina & Pratomo, 2019).

Kabupaten Toraja Utara telah menerapkan SIMDA sejak Tahun 2008, diawal penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, akan tetapi *output* yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur dari pada penyusunan dengan sistem manual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Penerapan SIMDA ini dapat membantu peningkatan kualitas laporan keuangan, karena membantu dalam proses penyajian laporan keuangan yang efisien, tepat waktu, serta transparansi sebagai media tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA. Penerapan SIMDA diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas

Laporan Keuangan, karena SIMDA pada SKPD di Wilayah Kab. Toraja Utara merupakan media yang sempurna untuk pengelolaan keuangan daerah. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, penguasaan serta pemanfaatan SIMDA belum optimal dalam proses pengelolaan keuangan daerah dengan kendala yang paling sering ditemukan yakni kurang pemahamannya pengguna terkait fitur SIMDA karena penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan sehingga belum siap menghadapi perkembangan teknologi dan informasi, selain itu kurangnya kemauan untuk belajar dan hanya mengandalkan pengalaman saja.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kapabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dimediasi Oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Kab. Toraja Utara”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (simda) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?

3. Apakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (simda) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?
4. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan jika dimediasi oleh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut kapabilitas berpengaruh terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (simda) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut kapabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (simda) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut kapabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan jika dimediasi oleh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (simda) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teori**

Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan wawasan atau pengetahuan serta pola pikir peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan implementasi pada keadaan atau praktek yang sesungguhnya terjadi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan kapabilitas terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (simda) dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ini kedalam enam bagian dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua tinjauan pustaka yang berisikan tentang landasan teori mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian dan tinjauan empiris

Bab ketiga : KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ketiga merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis

Bab keempat : METODE PENELITIAN

Bab keempat merupakan rancangan penelitian, situasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab kelima : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab kelima menunjukkan deskripsi serta olah data statistik hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bab keenam : PENUTUP

Bab keenam terdiri dari kesimpulan dan saran untuk peneliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

Dalam penelitian ini, teori utamanya (*Grand Theory*) adalah *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 yaitu suatu adaptasi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan pemakai (*User acceptance*) terhadap teknologi. Model ini dikembangkan kembali oleh beberapa peneliti seperti Szajna (1994), Igbaria et al., (1995) dan Venkatesh & Davis (2000) dalam Jogyanto (2007).

Menurut Wijaya (2005:39) menyatakan bahwa *Technology Acceptance Model (TAM)* mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan yang mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi, dan faktor kedua mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negatif akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

Terdapat lima konstruk utama yang membentuk TAM, kelima konstruk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persepsi Kegunaan/Manfaat (*Perceived Usefulness*)

Jogyanto (2007) mendefinisikan Persepsi Kegunaan (*perceived usefulness*) sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan

suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Manfaat penggunaan TI dapat diketahui dari kepercayaan pengguna TI dalam memutuskan penerimaan TI, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan TI tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Pengukuran konstruk kegunaan (*usefulness*) menurut Davis dalam Jogiyanto (2007) terdiri dari (1) Menjadikan pekerjaan lebih *cepat (work more quickly)*, (2) Bermanfaat (*useful*), (3) Menambah produktifitas (*Increase productivity*), (4) Mempertinggi efektifitas (*enchance efectiveness*) dan (5) Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi. Selain itu konstruk kegunaan persepsian merupakan konstruk paling signifikan dan penting mempengaruhi sikap (*attitude*), minat (*behavioral intention*) dan perilaku (*behaviour*) di dalam menggunakan teknologi informasi dibandingkan dengan konstruk yang lain.

b. Persepsi Kemudahan Pengguna (*Perceived Ease of Use*)

Kemudahan pengguna (*ease of use*) didefinisikan sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari komputer. Pengguna TI mempercayai bahwa TI yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah

pengoperasiannya (*compatible*) sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. Davis et al. dalam Jogiyanto (2007) memberikan beberapa indikator konstruk kemudahan penggunaan yaitu; (1) Kemudahan untuk dipelajari (*easy to learn*), (2) *Controllable* (3) *Clear & understandable*, (4) *Flexible*, (5) Keterampilan menjadi bertambah (*easy to become skillful*) (6) Mudah digunakan (*easy to use*).

c. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward Behaviour*)

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behaviour*) didefinisikan oleh Davis et al. dalam Jogiyanto (2007) sebagai perasaan positif atau negative seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan.

d. Minat Perilaku (*Behavioral Intention*)

Minat perilaku adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku jika mempunyai keinginan atau minat untuk melakukannya (Jogiyanto, 2007). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minat perilaku merupakan prediksi terbaik dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem.

e. Perilaku (*Behaviour*)

Perilaku (*behaviour*) adalah tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku (*behaviour*) adalah penggunaan sesungguhnya (*actual usage*) dari teknologi (Jogiyanto, 2007).

### **2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dari praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya, orang-orang yang bekerja bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia didalam organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai berbagai tujuan. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai menjalankan proses pemeriksaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan, pelatihan-pelatihan, masalah profesional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan (Raymond, 2015).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal dan teknologi, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya, di samping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing yang langgeng (Gayo, 2017).

Lebih lanjut dalam penelitian Saleh (2013:90-91) Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu bidang ilmu manajemen khusus yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia (MSDM), disamping manajemen pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dan memiliki

banyak tantangan, sebab manusia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Manusia mempunyai perasaan dan pikiran, tidak seperti mesin atau sumber daya lain yang dapat diatur sesuka hati pengaturnya. Manajemen sumber daya manusia merupakan program, aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakannya untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.

Paradigma organisasi yang mempekerjakan sumber daya manusia apa adanya atau cukup sumber daya manusia yang disiplin dan kerja keras saja harus diubah menjadi paradigma baru, yaitu mempekerjakan sumber daya manusia yang disiplin, kerja keras dan cerdas, integritas, serta memiliki hasrat atau ambisi tinggi dalam berkarir. Dengan demikian, semakin besarnya peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan dari berbagai perubahan yang terjadi. Sedangkan ditambahkan oleh Parasuraman, Zeithaml & Berry dalam Raymond (2015) “Kualitas pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya”. Dari pengertian berbagai pakar tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang diharapkan atas pelayanan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa didalam suatu organisasi, konsep kualitas pelayanan menjadi ukuran keberhasilan organisasi, keberhasilan organisasi yang dimaksud baik itu pada organisasi bisnis maupun juga pada organisasi yang bertugas untuk menyediakan pelayanan publik.

Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya berkenaan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang melakukan berbagai kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang ikut serta menentukan kualitas hidupnya. Jadi kalau kita berbicara soal pengembangan kualitas sumber daya manusia berarti berkaitan dengan usaha peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja seseorang, secara garis besarnya bagi tenaga yang berada pada tingkat bawah/operasional menyangkut masalah kualitas teknis operasionalnya, tingkat menengah menyangkut kualitas teknis operasional, *supervisory* dan manajerialnya, yang bekerja pada tingkat yang tinggi menyangkut kualitas manajerial dan komunikasinya.

Untuk keperluan peningkatan kualitas, pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga jalur utama yaitu (Ruhana, 2012):

- a. Jalur pendidikan formal
- b. Jalur latihan kerja
- c. Jalur pengembangan/ pengalaman di tempat kerja.

Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama dan atas, dan perguruan tinggi. Jalur pendidikan formal ini bertujuan untuk membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian.

### **2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik**

Teori Implementasi kebijakan publik model George C. Edward diperkenalkan pada tahun 1980. Teori implementasi kebijakan publik ini

menjelaskan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Pengkajian implementasi kebijakan publik model Edward ini dimulai dengan menjawab dua pertanyaan mengenai prasyarat dalam keberhasilan mengimplementasi kebijakan dan hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Tachjan, 2006:56-57).

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik (Subarsono, 2006:90).

Komunikasi berasal dari bahasa Latin "*Communis*" yang berarti sama (*common*), maksudnya penyampaian gagasan/ide dengan menetapkan terlebih dahulu titik temu yang sama. Komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Komunikasi memunyai lingkup yang luas dan komprehensif. Komunikasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis (Gibson et al., 2009:432).

Robbins et al., (2009:271) menambahkan bahwa komunikasi di dalam organisasi sering digambarkan sebagai komunikasi formal. Komunikasi formal mengacu pada komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi (struktur organisasi). Arah komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi ke bawah (komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawan), komunikasi ke atas (komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer), komunikasi lateral (komunikasi yang terjadi diantara sesama karyawan ke manajer), komunikasi diagonal (komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi).

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Implementasi kebijakan model Edward mengemukakan tiga indikator tersebut yaitu: (1) transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan; (2) kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua; (3) konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Tachjan, 2006:82).



Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan (Tachjan, 2006:36).

## 2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumber daya, Schermerchorn, Jr mengelompokkan sumber daya terdiri atas *information, material, equipment, facilities, money, people*. Sementara Hodge mengelompokkan sumber daya ke dalam *human resources, material resources, financial resources dan information resources* (Tachjan, 2006:134). Implementasi kebijakan publik model George. C Edward, mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari *staff, information, authority, facilities* berupa *building, equipment, land and supplies*. Sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan (Tachjan, 2006:135).

Sitohang dan Kariono (2015) menjelaskan sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya

manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia (*staff*), implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari SDM yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah SDM yang sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
- 2) Anggaran (*budgetary*), dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- 3) Fasilitas (*facility*), fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran (teknologi informasi) akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William & Sawyer, 2011:4). Teknologi informasi meliputi perangkat keras (*hardware*),

perangkat lunak (*software*), data dan *data bases*, telekomunikasi, teknik analisis sistem dan desain (Turban & Volonino, 2011:9). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*), untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

- 4) Informasi dan kewenangan (*information dan authority*). Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait dengan pengimplementasian suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap, serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan (Tachjan, 2006:83).

Robbins et al. (2009:74) berpendapat bahwa komitmen organisasi (*organizational commitment*), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Gibson et al., (2009:182) menambahkan komitmen terhadap organisasi melibatkan tiga sikap yaitu mengidentifikasi tujuan organisasi, perasaan

keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi dan perasaan loyalitas terhadap organisasi, sehingga dimaknai bahwa komitmen organisasi merupakan suatu bentuk identifikasi, loyalitas dan keterlibatan yang diekspresikan oleh karyawan terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang baik berarti bahwa pegawai tersebut memiliki loyalitas terhadap organisasi dimana ia berada saat ini dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi tempat ia bekerja.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius (Tachjan, 2006:83).

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu (Tachjan, 2006:88).

Karakteristik lokasi sebuah struktur birokrasi yaitu demografi juga menjadi hakikat dan tujuan dari sebuah implementasi kebijakan publik.

Demografi juga dapat memainkan peran penting dalam domain perilaku organisasi ketika menghadapi perubahan. Faktor ini penting untuk mengembangkan kognisi dan perilaku individu. Faktor-faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, kepemilikan di perusahaan, posisi/jabatan, status pekerjaan, masa kerja, pasangan, jumlah anak, dan latar belakang pendidikan (Madsen et al., 2005).

Struktur organisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Sitohang & Kariono, 2015).

### **2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Menurut Wilkonson (2000:25) terdapat kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan,

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. Hal tersebut juga berlaku dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Fauzia, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut : Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: 1. Pemerintah pusat; 2. Pemerintah daerah; 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; 4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (Sulantari, 2019).

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan keuangan tersebut harus mengacu pada standar yang berlaku serta memenuhi karakteristik

yang berkualitas. Pengertian kualitas di kemukakan oleh Goetsch & Davis dalam Tangkilisan (2007:209), yaitu sebagai berikut : “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Menurut Indra Bastian (2010:9), pengertian dari kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut : “Kualitas Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Fraser & Ormiston dialih bahasakan oleh Setyautama (2008), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambaran yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran.”

Laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu meminimalkan resiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Ada beberapa definisi dari laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintahan. Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut : “Laporan keuangan adalah

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Kasmir (2012:45) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi.

Nordiawan et al., (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan



keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

#### **2.1.4. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Menurut Wilkonson (2000:5): ” *Information is intelligence that is meaningful dan useful to persons for whom it is intended*”. Tujuan dari sistem informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakaian dengan mengacu pada kondisi bahwa informasi yang digunakan relevan, tepat dan akurat. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan informasi yang cepat dan tepat (Hakim, 2018).

Dalam penelitian Nur Alfiani (2017) SIMDA atau sistem informasi manajemen keuangan daerah adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan kas daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik. Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) merupakan aplikasi atau *software* yang diperuntukkan bagi pemerintahan, yang mampu memberi kemudahan untuk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, hingga fungsi akuntansi dan pelaporan. Suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pedoman dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SIMDA secara umum digunakan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (Khoirunisa, 2016).

Menurut PP nomor 192 Tahun 2014 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebagai berikut : “program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.”

Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan maupun dalam proses pelayanan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. (<http://www.informatika.lipi.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia>).

Pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya dimana pengukurannya berdasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sarana penunjang/pendorong bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Rahmawati, 2010).

Wilkinson et al., dalam Nurilah (2014) Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Kadir, 2003). Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).

Perangkat keras menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, *printer* dan *keyboard*. Adapun perangkat lunak meliputi : instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut, Sedangkan Haag (2000) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok antara lain (Amijaya, 2000). :

1. Teknologi masukan (*input*) segala perangkat yang digunakan untuk mengangkat data/informasi dari sumber asalnya.
2. Teknologi keluaran (*output*) agar informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk baik kertas dengan menggunakan printer maupun melalui media penyimpanan seperti *hardisk*, dsb.
3. Teknologi perangkat lunak (*software*) untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer.
4. Teknologi penyimpan (*storage*) teknologi penyimpan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.
5. Teknologi telekomunikasi (*telecommunication*) teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi.
6. Teknologi pemroses (*process*) mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data/program

berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen *CPU*.

Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC (*Personal Computer*) mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja kerja (*desktop*), seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer.

Menurut Dewi (2014) definisi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebagai berikut: “Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Definisi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menurut Djaja dalam Ole (2014) ialah : “Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi *database* yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”. Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Menurut Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Unsur-unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam cetak *Blue Print* Sistem Aplikasi *e-Government* tercantum dalam kerangka arsitektur *e-Government* terdiri dari empat lapis struktur yaitu :

1. Akses.
2. Portal Pelayanan Publik.
3. Organisasi, Pengelolaan dan pengolahan informasi.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana.

Unsur-unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akses

termasuk jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2. Portal

Pelayanan Publik. Situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik disejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi Pengelolaan dan pengolahan informasi

Organisasi pendukung (*Back Office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana

Baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*) maupun portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman dan terpercaya.

#### **2.1.5. Kapabilitas**

Robbins mendefinisikan kapabilitas sebagai kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan (Robbins & Judge, 2008). Setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam hal kemampuan yang membuatnya secara relative superior atau inferior terhadap yang lain dalam melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu. Manajemen harus mengetahui bagaimana orang berbeda dalam hal kapabilitas dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa seorang pekerja akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Kapabilitas/kemampuan merupakan suatu penilaian terkini berdasarkan apa yang dilakukan seseorang. Kemampuan juga dapat diartikan sebagai kapasitas seorang individu dalam melakukan beragam tugas pada sebuah pekerjaan. Kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, fisik dan intelektual. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas memecahkan masalah, menalar, berfikir dan mental. Kemampuan fisik merupakan kemampuan menjalankan tugas yang menuntut kekuatan, keterampilan, stamina dan karakteristik serupa. Kemampuan fisik tertentu bermakna penting bagi

keberhasilan pekerjaan yang lebih standar dan kurang membutuhkan keterampilan. Seperti, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kekuatan kaki, ketangkasan fisik, stamina atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen dalam mengidentifikasi kemampuan fisik seorang karyawan (Robbins & Timothy, 2008:57).

Kapabilitas dinamis yang baik mendukung kualitas operasional implementasi SAP yang termasuk kualitas laporan keuangan suatu instansi pemerintahan. Hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa dimensi-dimensi kapabilitas dinamis, berpengaruh secara positif terhadap proses inovasi manajemen. Penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian secara kualitatif di pemerintah daerah Jerman menyimpulkan bahwa kapabilitas dinamis yang berbeda menimbulkan adanya perbedaan model dan rutinitas aktual yang dijalankan. Begitupula dengan penelitian kuantitatif berusaha menemukan hubungan antara kapabilitas sistem informasi akuntansi yang dinamis terhadap kinerja proses akuntansi serta terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian membuktikan adanya hubungan yang kuat dari kapabilitas dinamis untuk mendukung kinerja proses akuntansi dan kinerja organisasi (Bondan et al., 2017).

Tidak bisa kita pungkiri peranannya terhadap kinerja seorang pengelola keuangan daerah beserta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan yaitu kapabilitas. Robbins (2012:34), mengartikan bahwa kapabilitas (kemampuan) merupakan sebuah kapabilitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan



merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Manajemen harus mengetahui bagaimana orang berbeda dalam hal kapabilitas (kemampuan) dan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa seorang pekerja akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kapabilitas yang dimiliki seorang pegawai akan menentukan keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Khodir & Makmur, 2020).

Amit dan Schoemaker dalam penelitian Puspitasari et al., (2021) melihat kapabilitas organisasi sebagai kapasitas organisasi untuk mengerahkan sumber daya, menggunakan proses organisasi untuk mempengaruhi tujuan yang diinginkan. Definisi ini memiliki dua fitur utama. Pertama, kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi. Kedua, tujuan utama kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah atribut modal keuangan, fisik, individual, dan organisasi yang menjadi modal dasar organisasi.

Kapabilitas seseorang dalam organisasi dapat mempermudah mereka untuk berbuat *fraud* di organisasi tempat mereka bekerja (Yesiariani & Rahayu, 2017). Posisi dalam pekerjaan memberi kekuasaan bagi seseorang untuk mengendalikan situasi yang mereka inginkan untuk mendukung tindakan *fraud* (Agustina & Pratomo, 2019).

Hemani & Rashidi dalam Kurniawati (2019) mendefinisikan kapabilitas yang terkait kompetensi sebagai kemampuan ataupun perilaku pegawai dalam

melaksanakan serta mendukung bidang kerjanya. Lebih lanjut Chan dalam penelitian Kurniawati (2019) mengutarakan pendapat bahwa kompetensi pegawai merupakan pencerminan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai tersebut.

Harris dalam Rahmadhani (2018) menjelaskan kapabilitas sebagai suatu pengetahuan dasar yang meliputi kemampuan hingga segala syarat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Definisi kompetensi selanjutnya dapat diartikan sebagai padu padan dari suatu pengetahuan, keterampilan melaksanakan pekerjaan, serta sikap individu (pegawai) yang menunjukkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dengan baik. Oleh karena itu menurut Rahmadhani (2018), kompetensi menjadi faktor dasar yang perlu dimiliki seorang pegawai yang kelak akan menjadikannya mempunyai kelebihan serta menjadikannya berbeda dengan orang lain sehingga seorang pegawai berkompeten menjadi seorang yang penuh percaya diri dengan penguasaan serta pengetahuan yang dimiliki, sikap positif dalam melaksanakan pekerjaan serta keterampilan dasar dalam bekerja (Rahmadhani, 2018).

Kapabilitas personal sebagai pemakai sistem informasi berperan penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Oleh karena itu, setiap karyawan harus dapat menguasai penggunaan sistem berbasis komputer agar dapat memproses sejumlah transaksi dengan cepat dan terintegrasi, dapat menyimpan data dan mengambil data dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematik, menghasilkan laporan tepat waktu dalam berbagai bentuk, serta dapat

menjadi alat bantu keputusan. Semakin tinggi kemampuan teknik personal SIA akan meningkatkan kinerja SIA dikarenakan adanya hubungan positif antara kemampuan teknik personal SIA dengan kinerja SIA (Biwi et al., 2015).

Kapabilitas juga didefinisikan oleh Spencer & Spencer dalam penelitian Kurniawati (2019) yakni karakteristik dasar pegawai yang kaitannya dengan efektivitas kinerja maupun kinerja superior dalam pelaksanaan pekerjaan sama halnya dengan hasil penelitian Ikhsan (2019). Selanjutnya Robbins dalam Kurniawati (2019) berpendapat mengenai kapabilitas sebagai kapasitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dimana kapabilitas juga menjadi bagian dari karakteristik paling mendasar yang dapat dikaitkan pada proses peningkatan kinerja seorang pegawai sebagai individu maupun sebagai bagian dari tim.

Dari berbagai literatur yang merupakan hasil kajian empirik maupun konseptual, definisi tentang kompetensi secara umum dapat dilihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama menggambarkan kompetensi dari sudut pandang organisasi, yang mana kompetensi digambarkan sebagai pengetahuan, kepakaran dan kemampuan suatu organisasi yang dapat menjadikan organisasi tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya. Pengertian kompetensi dalam hal ini terkonsentrasi pada kompetensi suatu organisasi sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh. Sedangkan perspektif kedua mengarah pada kompetensi yang dimiliki individu. Dalam konteks ini, kompetensi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik yang dapat diidentifikasi dari seseorang yang melakukan pekerjaannya secara efektif. Karakteristik tersebut dapat meliputi

motif, sifat, keterampilan, citra diri, peranan sosial dan pengetahuan yang dimiliki (Kartika & Sugiarto, 2016).

Williams dalam penelitian Kartika & Sugiarto (2016) mengemukakan bahwa kompetensi individu menggambarkan apa yang seseorang mampu lakukan dan termasuk kombinasi motif dan sifat, citra diri seseorang dan peran sosialnya, keterampilan dan pengetahuan.

Krietner (2005) menjelaskan bahwa kapabilitas memberikan andil yang cukup besar bersama-sama dengan usaha dan keterampilan untuk kinerja seseorang. Membagi kapabilitas menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Kapabilitas kognitif atau kecerdasan yang menggambarkan kapabilitas individu untuk berfikir konstruktif, mempertimbangkan dan penyelesaian masalah.
- b. Kapabilitas fisik yang unik pada setiap tugas dalam pekerjaan

Pengukuran serta indikator yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kapabilitas pegawai yakni indikator yang telah dikemukakan oleh Spencer & Spencer dalam Rahmadhani (2018), dengan penetapan lima karakteristik utama dari kompetensi yang meliputi:

- 1) Motif sebagai sesuatu tujuan yang secara konsisten diinginkan ataupun dipikirkan pegawai untuk melakukan tindakan. Motif dapat mendorong, memilih perilaku tertentu ataupun mengarahkan ke suatu tujuan tertentu.
- 2) Sifat sebagai karakteristik fisik ataupun konsistensi respon pada berbagai situasi ataupun informasi.

- 3) Konsep diri sebagai nilai-nilai, citra diri serta sikap yang dimiliki seseorang pegawai. Kepercayaan diri dapat menjadi keyakinan seorang pegawai bahwa mereka dapat bekerja secara efektif dalam berbagai situasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari konsep diri seorang pegawai.
- 4) Pengetahuan sebagai informasi yang dimiliki pegawai pada bidang tertentu dimana pengetahuan menjadi sekumpulan kompetensi yang komplit.
- 5) Keterampilan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas fisik ataupun mental serta keterampilan kognitif yang termasuk proses analisis konseptual.

Dari perspektif kualitas maka kapabilitas sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut : Mengacu pada pendapat Salusu (2006) dimana kriteria kapabilitas SDM lebih mengarah kepada kriteria tim yang meliputi:

(1) Integritas seluruh karyawan

Integritas merupakan sikap mental dimana anggota organisasi senantiasa berperilaku sesuai dengan komitmen yang telah disepakatinya. Perilaku sebagai anggota tim akan sangat mematuhi aturan dan tata tertib yang telah digariskan organisasi. Pernyataan, sikap, keputusan dan perilaku anggota organisasi akan senantiasa berorientasi pada martabat, tujuan dan eksistensi organisasi.

(2) Dukungan Karyawan terhadap tujuan dan strategi organisasi

Dukungan pegawai terhadap tujuan Disdukpil yang intinya terdiri dari meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, meningkatnya sistem dan sarana pendukung (teknologi, pranata hukum, partisipasi masyarakat) dan meningkatnya fungsi administrasi kependudukan bagi perencanaan daerah, secara umum dapat

dikatakan cukup baik, baik dari para pegawai Disdukpil, mulai dari pegawai yang memiliki jabatan (Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi).

(3) Pemahaman karyawan terhadap tugas dan makna pelayanan

Pada umumnya pegawai sudah mengerti tugas dan kewajiban masing-masing, hanya saja hakekat pelayanan publik seringkali pegawai lupa dengan posisinya. Hal ini yang semestinya terus di-*refresh* kepada pegawai, apa itu pelayanan publik dan bagaimana seharusnya mereka memperlakukan publiknya.

Kemampuan kapabilitas personal tersebut dapat dijelaskan oleh Robbins (2008:45) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi.
- b. Memahami pengetahuan tugas dari pekerjaannya sebagai pemakai sistem informasi.
- c. Kemampuan mengerjakan tugas dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.
- d. Keahlian dalam mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya dalam pekerjaan.

## 2.2. Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian ini, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian yang berhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

<b>Nama dan tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Wahda et al., (2020)	<i>The Role of Competence dan Leadership Style in Improving Employee</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi dan gaya kepemimpinan secara simultan

Nama dan tahun	Judul	Hasil penelitian
	<i>Performance: Characteristics of Personality as Moderation Variables</i>	memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara sebagian tampaknya kompetensi memiliki efek positif dan signifikan, tetapi gaya kepemimpinan memiliki efek positif tetapi tidak signifikan pada kinerja karyawan. Karakteristik kepribadian menjadi moderator atau calon moderator homologi pada hubungan antara kompetensi dan kinerja karyawan serta hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan
Muhammad Arifin (2015)	<i>The Influence of Competence, Motivation, dan Organisational Culture to High School Teacher Job Satisfaction dan Performance</i>	<i>Competence dan job satisfaction affect positively dan significantly teacher performance, in fact organizational culture just has positive but insignificant effect to job satisfaction.</i>
Ole (2014)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)	hasil penelitiannya implementasi sistem informasi manajemen daerah (simda) berjalan baik terhadap kualitas laporan keuangan SKPD
Lustiadi (2016)	Kapabilitas Sumberdaya Manusia Pada Organisasi Publik Pemberi Layanan Dasar Di Kabupaten Waykanan	Sumber daya manusia pada organisasi publik pemberi layanan dasar di Kabupaten Waykanan secara umum belum kapabel. Beberapa elemen yang menjadi penyebabnya adalah: Kualifikasi pegawai yang masih rendah, distribusi pegawai yang belum merata, kurangnya pemahaman pegawai terhadap makna pelayanan dan secara kualitas personal, masih kurang <i>knowlegde</i> dan <i>skill</i> pegawai.
Muchlis et al., (2019)	Persepsi Atau Tanggapan Penggunaan Teknologi Informasi, Struktur Organisasi Dan Produktivitas Karyawan Pada PT. Solusi	Hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa persepsi atau tanggapan responden mengenai penggunaan teknologi informasi yang digunakan tinggi dan terlaksana dengan baik,

Nama dan tahun	Judul	Hasil penelitian
	Transportasi Di Makassar	kemudian persepsi atau tanggapan responden ditinjau dari struktur organisasi sudah terlaksana dengan baik, sedangkan persepsi responden mengenai produktivitas karyawan sudah dipersepsikan baik oleh karyawan
Sutiyadi (2017)	Analisis Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer, Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pemerintahan Provinsi Dki Jakarta	Terdapat pengaruh positif Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang artinya semakin baik Sistem Informasi Manajemen yang digunakan, maka akan semakin baik pula Kinerja pegawai
Rahmayuni (2018)	<i>Quality Analysis Of Management Information System Dan Work Environment To Employee Performance</i>	<i>Variable Quality of information systems while the working environment variables have the lowest value, Institute of Economic Sciences expected to pay attention quality of information systems to improve employee performance</i>
Cipmawati, Mohune (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo)	SIMDA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Christanti (2010)	Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat)	Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Subaweh (2008)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan	menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan



Nama dan tahun	Judul	Hasil penelitian
Widyawati (2015)	Keuangan Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo	menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo.
Rahmawati (2016)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	hasil penelitiannya adanya perbandingan dalam jumlah laporan keuangan yang disajikan dan adanya penambahan pos- pos dalam laporan keuangan berbasis akrual.

## **BAB III**

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Dari literatur yang telah dikumpulkan maka penjabaran mengenai hubungan antar variable dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **3.1.1. Pengaruh Kapabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Proeller et al. dalam Bondan (2017) menjelaskan konsep kapabilitas dinamis dapat menjelaskan bagaimana sekelompok sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat disusun dan dikombinasikan ulang untuk menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud perubahan yakni adanya kemajuan teknologi yang menuntut adanya kapabilitas pengelola pegawai dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Amit dan Schoemaker dalam penelitian Puspita Sari et al., (2021) melihat kapabilitas organisasi sebagai kapasitas organisasi untuk mengerahkan sumber daya, menggunakan proses organisasi untuk mempengaruhi tujuan yang diinginkan. Definisi ini memiliki dua fitur utama. Pertama, kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi. Kedua, tujuan utama kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah atribut modal keuangan, fisik, individual, dan organisasi yang menjadi modal dasar organisasi.

Wahyono (2004:12) juga mengemukakan bahwa adanya pengaruh kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan yaitu : “karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut valid atau benar. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas.”

### **3.1.2. Pengaruh Kapabilitas Terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Hemani dan Rashidi dalam Kurniawati (2019) mendefenisikan kapabilitas yang terkait kompetensi sebagai kemampuan ataupun perilaku pegawai dalam melaksanakan serta mendukung bidang kerjanya. Lebih lanjut Chan dalam penelitian Kurniawati (2019) mengutarakan pendapat bahwa kompetensi pegawai merupakan pencerminan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai tersebut.

Menurut Indrayani & Gatingsih (2013:187) mengemukakan bahwa : “Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan

keuangan dan informasi keuangan lainnya lebih komprehensif yang meliputi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.”

Menurut Mohune (2013) menyatakan bahwa : “Sistem Informasi Manajemen Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam pelaporan keuangan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah juga akan semakin baik pula.”

### **3.1.3. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Herawati (2014) Pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : “Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal atau reliabilitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.”

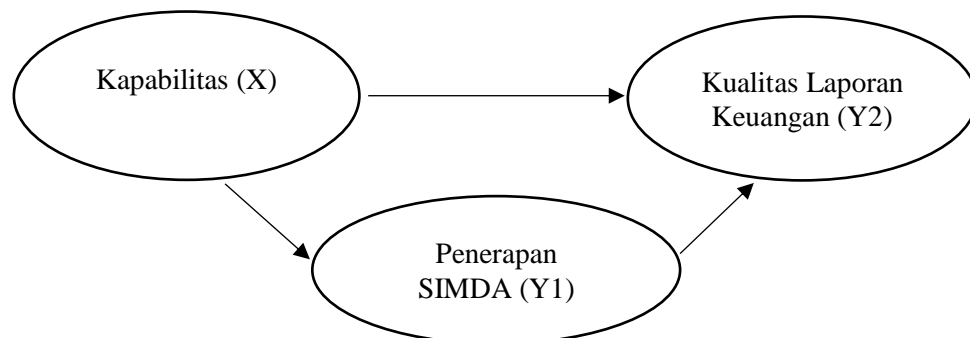
PP Nomor 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah serta menyalurkan informasinya kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak

untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Menurut Mohune (2013) menyatakan bahwa : “Sistem Informasi Manajemen Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam pelaporan keuangan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah juga akan semakin baik pula.”

Dalam Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh pemda-pemda di Indonesia untuk mengelola proses keuangan didaerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

### **3.2. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
2. Diduga kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
3. Diduga implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
4. Diduga kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan jika dimediasi oleh implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.